JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 6, No. 2, Juli – Desember 2020

- **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri)**
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin 117

ISSN: 2442-9090
e-ISSN: 2579-9509

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Tindakan <i>Contempt of Court</i> dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura Muhammad Ridwan Fadhly, Anita Afriana, Sherly Ayuna Putri	1
2. <i>Actio Pauliana</i> sebagai Upaya Perlindungan bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Rai Mantili.....	21
3. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Wiwin Dwi Ratna Febriyanti.....	39
4. Keabsahan Pembuktian Akta Notaris di Pengadilan sebagai Akta Otentik (Kajian Putusan No. 3591K/PDT/2018) Hazar Kusmayanti, Yuda Anrova	53
5. Prinsip Kemanfaatan Penyelesaian Sengketa Elektronik sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Elektronik Ayudya Rizqi Rachmawati, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti.....	67
6. Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris Fakta Andony, Anita Afriana, Indra Prayitno	81
7. Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia Mardalena Hanifah.....	101
8. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Kab. Kediri) Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin	117
9. Pengaturan Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia Mustakim.....	133
10. Kepastian Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Ditinjau dari Keberadaan Lembaga <i>Rechtsverwerking</i> (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang) Azmi Fendri; Yussy A. Mannas.....	151

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI MASA PANDEMI COVID 19. (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI)

Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin

emipuasa.fh@uniska kediri.ac.id; zainal.fh@uniska-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Uniska Kediri

ABSTRAK

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan menjawab dua permasalahan. Pertama bagaimana prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Kedua, bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, pada masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Langkah penelitian yang dilakukan adalah pertama peneliti mendatangi kantor pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk mencari data awal, dan mewawancarai sumber data, kemudian diolah dan disajikan disesuaikan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data-data yang diperoleh lapangan. Teori yang digunakan adalah sistem hukum. Intinya ada tiga komponen dalam hukum yaitu substansi, struktur dan culture (masyarakat). Temuan penelitian ada dua yaitu pertama prosedur mediasi yang diatur dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan, pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi. Temuan kedua, penerapan Perma RI Nomor: 1 Tahun 2016 tentang mediasi di masa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menyimpang dari dasar hukum yang telah ditetapkan. Hakim tetap menjatuhkan putusan meski mediasi tidak dihadiri pihak Pemohon secara langsung dengan alasan pandemic covid 19. Mediasi dilaksanakan dengan cara teleconferensi, atau dengan video call.

Kata Kunci: mediasi; peraturan mahkamah agung; pengadilan agama

ABSTRACT

This article is the outcome of research aimed at took two problems. First, what is the procedure for the mediation process in accordance with the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016. Second, how is the implementation of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016, during the Covid 19 pandemic at the Kediri District Religious Court. The method used in this research is juridical empirical. The research steps taken were: First, the researcher visited the Kediri District Religious Court office. To find initial data, and interviewed the data source, then processed and presented according to the theory used. The theory used is the legal system. In essence, there are three components in law, namely substance, structure and culture (society). The research found two things, namely: first, that Mediation based on the regulations of the Supreme Court is carried out in three stages, first is pre-mediation, the

second stage is the application of mediation and the third stage is the implementation of mediation. The second finding is that the implementation of Perma RI Number: 1 of 2016 concerning mediation during the Covid 19 pandemic at the Kediri District Religious Court deviates from the established legal basis. The judge still gave a verdict or sentenced him, even though the Petitioner did not come at the time of mediation on the grounds of the Covid 19 Pandemic.

Keywords: *mediation; regulation of the supreme court; religious court*

LATAR BELAKANG

Penelitian ini membahas persoalan mediasi dimasa pandemi covid 19, yang dilaksanakan di Pengadilan Agama, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016. Topik mediasi di masa pandemi, layak untuk diteliti mengingat pelaksanaan di lapangan banyak ditemukan penyimpangan, atau ketidaksesuaian dengan teori yang seharusnya digunakan untuk pedoman dalam menyelesaikan perkara dengan mediasi.

Artikel ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis empiris, atau penelitian lapangan yang juga sering disebut *socio legal reseach*, yaitu salah satu jenis penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dilapangan. Atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹ Penelitian empiris juga bisa diartikan merupakan penelitian yang dilakukan pada kenyataan lapangan yang sebenarnya, keadaan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, bertujuan untuk menemukan fakta atau data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi untuk menyelesaikan masalah.²

Data penelitian yang digunakan untuk diolah dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah data primer, yaitu dengan melakukan observasi dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Selain itu juga melakukan wawancara dengan ketua Pengadilan Agama dan Hakim anggota serta Mediator serta Panitra dan pihak pemohon serta termohon, dalam beberapa perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Penelitian ini mengangkat dua pertanyaan penelitian yaitu pertama bagaimana tata cara prosedur mediasi di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016? Kedua bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang mediasi dimasa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹ Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 116

² Bambang Waluyo 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

Metode penelitian empiris dipilih untuk menjawab pertanyaan penelitian dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu pertama bagaimana tata cara prosedur mediasi di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 dan kedua untuk mengetahui bagaimana proses prosedur mediasi di Pengadilan Agama di masa pandemi Covid 19.

Langkah penelitian yang dilakukan adalah pertama peneliti mendatangi kantor pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk mencari data awal, dan mewawancarai sumber data, kemudian diolah dan disajikan disesuaikan dengan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil data-data yang di peroleh lapangan. Teori yang digunakan adalah dari Lawrence M. Freidmem tentang sistem hukum. Yang intinya ada tiga komponen dalam system hukum yaitu substansi, struktur dan culture (masyarakat).

Langkah terakhir adalah dengan melakukan interpretasi dan konstruksi bahan hukum yang merupakan langkah analisis bahan hukum yang bertujuan untuk menafsirkan bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terdapat beberapa hal yang membedakan antara Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Menjadi persoalan inti ketika dimasa pandemi adalah mediasi yang mestinya kedua belah pihak hadir secara fisik, namun pada saat pandemi bisakah melalui online dan apakah syah. Dengan alasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga pemohon yang berasal dari luar Jawa, atau luar kota tidak bisa menghadiri mediasi di Pengadilan Agama, dimana Pemohon dan Termohon berpekara.

PEMBAHASAN

Tata Cara Prosedur Mediasi Di Pengadilan Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Pengertian mediasi bisa dilihat dari berbagai sisi. Istilah mediation berarti pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara yang cenderung mencari penyelesaiannya.⁴ Sedangkan pihak yang menjadi penengah disebut dengan istilah “mediator”.⁵ Gary Goodpaster dalam bukunya menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak/*impartial* dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

³ Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, h. 80-86

⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinar Grafika, cetakan ke 4. Jakarta, h. 33

⁵ *Ibid*

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan (perdamaian) yang berarti berada ditengah karena seorang yang melakukan mediasi (*mediator*) harus berada ditengah orang yang bertikai.⁶

Mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara.⁷

Secara normatif, mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.⁸

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan diluar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) ke dalam proses peradilan (*litigasi*) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.⁹

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari

⁶ Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta.

⁷ Rahadi Wasi Bintoro, "Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan," 2016, Volume 31, Nomor 1, *Jurnal Yuridika*, h. 72.

⁸ Pengadilan Negeri Lombo, Pengantar Mediasi dan Prosedur Mediasi Di Pengadilan, http://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=559:pengantar-mediasi-dan-prosedur-mediasi-di-pengadilan&catid=81&Itemid=1173, diakses Senin 10 Desember Pukul 10 WIB.

⁹ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

hakim itu sendiri yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut. Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan di awal persidangan, selebihnya hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.¹⁰

Namun dilihat dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dirasa belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan. Belum efektif dan belum optimalnya Perma sebelumnya yaitu Nomor: 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, diantaranya sebagai berikut: (a) Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 tentang definisi mediator yang tidak mensyaratkan mediator harus bersertifikat, sehingga banyak hakim yang diangkat menjadi mediator tidak memiliki keterampilan khusus dalam melakukan mediasi; (b) Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan; (c) Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi.¹¹

Jika ditelaah lebih mendalam, bahwa secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat *antagonistic* (sangat berlawanan satu sama lain). Cara tradisional konvensional itupun harus segera di inggalkan, perlu dicari dan dipikirkan cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien. Penyelesaian perkara secara konvensional, secara perlahan ditinggalkan menuju sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan diri dengan laju perkembangan di masyarakat dengan cepat dan biaya murah.

Ada dua acara atau model penyelesaian perkara atau sengketa. Selain model penyelesaian sengketa secara konvensional melalui litigasi sistem peradilan dalam praktek di Indonesia dikenalkan pula model alternatif baru. Alternatif yang dimaksud diatas cukup populer di

¹⁰ Ainal Mardhiah, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008," Tahun 2011, Volume: Nomor 53, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, h. 155-156

¹¹ Siti Musawwamah, "Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan," Tahun 2014, Volumen 11, Nomor 2, *Jurnal Nuansa*, h. 344

Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yaitu alternatif penyelesaian sengketa diluar litigasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara yang saling menguntungkan (*win win solution*) bukan untuk mencari kalah menang (*win or lose*) sebagaimana hasil akhir jika penyelesaian dilakukan melalui proses litigasi. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Hukum acara yang berlaku sekarang, seperti Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak yang bersengketa untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Agama. Sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa perdata, kedua aturan tersebut menjadi landasan.

Ada dua jenis mediasi, yaitu diluar dan didalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016. Namun ada juga mediasi diluar pengadilan. Mediasi diluar pengadilan di Indonesia terdapat dalam beberapa Undang-undang yang sudah dimuat, seperti Undang-undang tentang Lingkungan, Undang-undang tentang Kehutanan, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen. Eksistensi mediasi merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik.

Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk kepengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai

asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan sangatlah diperlukan. Mengingat jumlah perkara yang masuk ke pengadilan meningkat tajam berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Sehingga, jika penyelesaian sengketa hanya dilakukan melalui pengadilan, maka akan terjadi penumpukan perkara. Untuk menghindari penumpukan perkara serta mendorong masyarakat menyelesaikan sengketa melalui proses di luar pengadilan, maka Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang merupakan revisi kedua dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003.

Studi efektifitas PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi dalam sistem peradilan (*court annexed mediation*) di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tertanggal 4 Februari 2016, dalam tatanan teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif.

Sebelumnya bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah pijakan para hakim untuk menyelesaikan sengketa dengan jalur mediasi dipengadilan namun didalam pengaturannya masih dirasa memiliki kekurangan, salah satunya adalah batas maksimal waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian dengan jalur mediasi, yakni berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 adalah 40 hari waktu kerja, sehingga pada tanggal 3 Februari 2016 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengganti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengurangi batas maksimal waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi berdasarkan Pasal 3 ayat (6) menjadi 30 hari masa kerja.

Dengan adanya Pasal 3 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 yang menghapuskan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 menjadikan waktu penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan menjadi lebih singkat 10 (sepuluh) hari kerja yaitu dari semula waktu penyelesaian sengketa perdata adalah 40 (empat puluh) hari kerja menjadi 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung sudah harus selesai.

Selain batasan waktu seperti yang dijelaskan diatas, juga ada perbedaan lainnya yaitu: Adanya kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Secara lengkap bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Adapun jenis perkara wajib menempuh mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain: Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Permohonan pembatalan putusan arbitrase; Keberatan atas putusan Komisi Informasi; Penyelesaian perselisihan partai politik; Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut; Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi); Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;

Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan pertama adalah tahap pramediasi dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya,

menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

Tahap kedua adalah pelaksanaan mediasi dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Tahap terakhir adalah implementasi mediasi yaitu para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016, mengatur proses pelaksanaan mengenai mediasi adalah pertama para pihak yang berperkara memilih mediator dalam menempuh proses mediasi pihak bersengketa berhak memilih mediator yang sesuai dengan pilihan mereka yang akan membantu menyelesaikan perselisihannya, oleh karena itu setiap pengadilan tingkat pertama wajib menyediakan daftar nama mediator, pengadilan tingkat pertama sekurang-kurangnya menyediakn lima mediator. Apabila ternyata para pihak yang berperkara selambat-lambatnya setelah dua hari kerja sejak hari sidang pertama tidak dapat menentukan pilihan, para pihak harus memberitahu Ketua Majelis Hakim agar dapat segera ditunjuk mediator yang dipilih dari hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat.

Kedua, para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik, sebab tujuan mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya itikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, itikad baik para pihak merupakan kunci keberhasilan mediasi. Ketiga para pihak menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan mediator. Resume perkara yang dimaksud di sini dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara atau usulan penyelesaian sengketa. Penyerahan resume bertujuan agar masing-masing pihak dan juga mediator juga memahami sengketa yang akan dimediasi. Dengan demikian pada saat mediasi para pihak maupun mediator telah memahami perkara.

Adapun tugas-tugas dari pada mediator terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, pada pasal 15, bahwa Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

Tugas mediator kemudian di perjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, Pasal 14 bahwa tugas dari mediator dalam setiap bertugas memediasi adalah:

“Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; g. mengisi formulir jadwal mediasi. h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 1. Menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian; k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.”¹²

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Setelah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi sangat diharapkan untuk mengurangi penunggakan perkara dan pemenuhan rasa keadilan yang cepat, tepat, sederhana dan murah dipihak berperkara. Namun seperti yang kemukakan diatas bahwa ternyata Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi tersebut hingga saat ini belum berhasil menyelesaikan sengketa

¹² Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016, Pasal 14

dengan mediasi, dimana salah satu penyebabnya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi tersebut masih kurang lengkap.

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: substansi hukum, stuktur hukum, dan budaya hukum.¹³ Yang dimaksud dengan substansial adalah hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupten Kediri, Munasik, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi telah diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebagaimana tahapan sidang pertama, maka sesuai aturan bahwa majelis hakim harus mengadakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi. Jika pemohon dan termohon hadir, namun tidak ada mediasi, maka sidang bisa batal. Sehingga mediasi itu wajib, sebab misi utama Pengadilan Agama adalah mendamaikan.

Mengenai perbedaan mendasar antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi dan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi, Munasik menjelaskan lebih lanjut bahwa perbedaan mendasar ada pada durasi proses berjalannya mediasi yang lebih singkat dari sebelumnya 40 hari dan dalam Perma yang sekarang diatur menjadi lebih singkat yakni 30 hari.¹⁴

Kelebihan dan kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 antara lain sebagai berikut: (a). Dijelaskan mengenai jenis perkara yang dikecualikan diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan mediasi yakni perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Pasal 4); (b). Dijelaskan mengenai sertifikasi mediator dimana setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi

¹³ W. Friedman, 1967, *Legal Teori*; Colombia Universiti Press, New York, h. 200

¹⁴ Wawancara dengan Munasik Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, menurut Munasik salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupten Kediri, disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi, yaitu ada mediator diluar hakim yang bertugas untuk memediasi berbagai perkara. Salah satu perkara yang di mediasi pada masa pandemic berdsarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi adalah perkara perceraian anantara Ali dan Kasmi, keduanya menguasai pada Advokat masing masing. Ali menguasai pada kantor advokat MTH and partner, sedangkan Kasmi menguasai pada kantor Advokat EMR and rekan.

Adapun duduk perkaranya adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tahun 1999, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar Kabupaten Kediri bulan November Tahun 1999, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah ke rumah dinas selama 15 tahunan dan memiliki 2 (dua), sampai sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, umur 18 tahun, dan umur 16 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut Termohon;

Kemudian kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk didamaikan dan bahkan dipersatukan lagi. Awal perselisihan dan pertengkaran terjadi kurang lebih sejak bulan April 2016. Perselisihn itu disebabkan beberapa hal diantaranya adalah Termohon tidak bersedia untuk menetap dan tinggal di rumah bersama yang dan Termohon lebih memilih tinggal di rumah dinas, bahkan Pemohon pernah diusir dari rumah dinas yang ditempati bersama oleh Termohon.

Termohon pernah melakukan pemalsuan data persyaratan pemecahan Kartu Keluarga, akhir dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan November 2016 sehingga Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon selama 3 tahun lebih. Termohon sudah mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. Antara Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan mediasi baik melalui keluarga besar Pemohon dan maupun Termohon, namun dari hasil mediasi tersebut tidak berhasil.

Pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Rahmani, M H, yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon, yang dilakukan secara *teleconference* Termohon *principal* berada di luar Pengadilan Agama Kabupaten. Kediri sedang yang hadir langsung dihadapan Mediator di ruang mediasi Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah Termohon *principal* bersama kuasanya

dan kuasa Pemohon namun sesuai Laporan Mediator tanggal 16 April 2020, mediasi tersebut gagal tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup berumah tangga bersama, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pada perkara nomor 1028/Pdt.G/202/PA.Kab.Kdr, putusan akhir Majelis Hakim mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Penggugat. Meskipun telah ada sanksi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang mengatur bagi Penggugat asli/Prinsipal yang tidak menghadiri mediasi yaitu berakibat gugatannya tidak dapat diterima, tetapi dalam perkara ini Hakim yang memeriksa menyimpangi aturan tersebut dan melakukan terobosan hukum meskipun dalam putusannya tidak dicantumkan dasar terobosan hukum.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang berbunyi “Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”, sehingga dengan kata lain Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 ini mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri secara langsung proses mediasi yang berlangsung baik dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum dari masing-masing para pihak atau salah satu pihak yang berperkara. Hal ini belum diatur dalam aturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Artinya pada persoalan ini ada kekosongan hukum (*vacuum of norm*) karena situasi darurat/keadaan memaksa belum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Terkait dengan perkara Nomor: 1028/Pdt.G/202/PA.Kab.Kdr, hakim Mediator dan hakim perkara memperbolehkan Penggugat asli/*prinsipal* tidak menghadiri mediasi, yang hadir hanya Kuasanya dikarenakan Penggugat ada di Kalimantan dan tidak memungkinkan hadir ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena situasi pandemic covid 19 yang periode awal diumumkan oleh Pemerintah adanya PSBB dan tidak ada penerbangan/angkutan yang bisa digunakan oleh Penggugat. Mediasi tetap berlangsung sesuai jadwal dan mediasi dilaksanakan dengan teleconference, yang tidak bertentangan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Kehadiran secara teleconference ini telah dianggap sebagai hadir secara langsung berdasarkan Pasal 5 ayat (3) yang tertulis: Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Pengaturan mediasi melalui teleconference dianggap syah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 2: Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.

Adapun alasan ketidak hadiran dalam Pasal 6 ayat (1). Perma mengatur bahwa boleh tidak hadir bila termohon atau pemohon berada di Luar Negeri, surat kuasa mediasi yang dikirim ke kuasa hukumnya yang dibuktikan stemple Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), atau kondisi sakit yang tidak memungkinkan hadir, atau pekerjaan yang tidak dapat digantikan orang lain. Pada perkara ini ketidak hadiran pemohon tidak menghadiri mediasi karena ada pembatasan social berskala besar (PSBB), sehingga tidak ada penerbangan dari Kalimantan ke Jawa. Meski demikian, Hakim mengabaikan alasan ketidak hadiran pemohon, dan tetap memutus perkara.

Pada perkara Nomor: 1028/Pdt.G/202/PA.Kab.Kd, bukan merupakan pengecualian perkara yang dimediasikan, sebab pengecualian perkara yang di maksudkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang tidak lagi membatasi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi hanya pada proses mediasi yang terkait dengan bereperkaranya di Pengadilan saja melainkan semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan baik perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan Verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2016.

PENUTUP

Prosedur mediasi yang diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2016, dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap pertama pra mediasi, tahap kedua penerapan mediasi dan tahap ketiga implementasi mediasi yaitu para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis dalam kesepakatan.

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dimasa pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, tidak diterapkan sebagaimana diatur dalam Perma tersebut. Hakim Mediator melakukan terobosan hukum dengan menyimpanginya yang membolehkan Pemohon principal tidak mengadiri mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan dilakukan secara teleconference, padahal Pemohon tidak berada di Luar Negeri dan tidak dalam kondisi sakit. Alasan ketidakhadiran Pemohon Principal karena saat itu ada Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan tidak ada penerbangan dari tempat tinggal Pemohon ke Surabaya. Dalam putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, yang dalam

kondisi normal, maka apabila Principal tidak menghadiri mediasi berakibat gugatannya/permohonannya tidak dapat diterima.

Disarankan bahwa pada masa pandemic covid -19 Hakim Mediator/Mediator luar tidak perlu menerapkan secara kaku/normative terhadap pelaksanaan mediasi berdasar Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, diperlukan keberanian hakim/mediator mengambil langkah/terobosan hukum agar asas pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan tetap tercapai.

Perlu adanya penambahan aturan/revisi pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang membolehkan Principal tidak hadir dalam mediasi jika terjadi kondisi memaksa, huru hara dan bencana dan dapat dilakukan teleconference atau memberi kuasa pada Advokat yang ditunjuk.

DAFTAR BACAAN

Buku:

Arikunto, Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Friedman, W, 1967, *Legal Teori*, Colombia Universiti Press, New York.

Goodpaster, Gary, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta.

Ranuhandoko, Gary, 2000, *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suratman dan Philips, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

Rahadi Wasi, Bintoro, “Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan”, *Jurnal Yuridika*, Volume 31, Nomor 1, April 2016.

Mardhiah, Ainal “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 53, April, Tahun 2011.

Musawwamah, Siti, “Mediasi Integratif di Pengadilan Agama Pamekasan”, *Jurnal Nuansa*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2014

Peraturan Perundang-Undang:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi

Sumber Lain:

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Perkra Nomor: 1028/Pdt.G/202/PA.Kab.Kd

Pengadilan Negeri Lombo, Pengantar Mediasi dan Prosedur Mediasi Di Pengadilan, http://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=559:pengantar-mediasi-dan-prosedur-mediasi-di-pengadilan&catid=81&Itemid=1173, Senin 10 Desember jam 10 WIB.

Wawancara dengan Munasik Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri